

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Demokrasi**

Berbicara tentang demokrasi tentu terlebih dahulu melihat dari asal katanya yang merupakan berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan/kekuatan dengan artian demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau suatu sistem pemerintahan dimana rakyat yang memerintah, pengertian demokrasi ini tidak sama sekali berubah dari zaman Yunani kuno hingga sekarang ini. Sistem demokrasi pada zaman Yunani kuno merupakan demokrasi langsung, dimana setiap warganegara dapat memerintah dan ikut dalam menentukan kebijakan pemerintah negara (Rasyid, 2017).

Kemudian Deliar Noer mengartikan bahwa pemerintahan rakyat ialah bahwa pada tingkat terakhir pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan ini menentukan kehidupan rakyat. Digambarkan pemerintahan Belanda saat itu yang menentukan semua kebijakan pemerintahan hal ini dimengerti oleh cendekiawan kita dengan bagaimana seharusnya pemerintahan itu dipandang dari sudut kepentingan rakyat, hak-hak politik rakyat seperti hak pilih dan hak untuk lepas dari kerajaan Belanda (Noer, 2020)

Pengertian demokrasi kemudian dikemukakan oleh Abraham Lincoln yaitu "*democracy is government of the people, by the people, and for the*

*people*”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan artian pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang sah merupakan pemerintah yang mendapatkan pengakuan dan dukungan dari rakyat atau mewakili kekuasaan terhadap pemerintah, jalannya pemerintahan juga diawasi oleh rakyat, pemerintahan ini merepresentasikan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi.

Indonesia menganut demokrasi pancasila seperti yang dikemukakan oleh Darmihardjo yang mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti dalam ketentuanketentuan Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan pedoman bagi rakyat indonesia yang didalamnya memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai dalam pancasila dijadikan sebagai pedoman menjalankan demokrasi (Gandamana, 2017).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan perwujudan demokrasi untuk mewakili kekuasaan rakyat terhadap pemerintah. Menurut Nohlen pemilu adalah ”satu-satunya metode demokratik” untuk memilih wakil rakyat. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat baik legislatif maupun eksekutif. Pemilu Legislatif digunakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sedangkan eksekutif untuk memilih Presiden dan wakil presiden dan kepala daerah (Rasyid, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan ratyat untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2014 pasal 1 ayat 5 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dijelaskan bahwa Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Kemudian di ubah melalui undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan kepala daerah di Kabupaten Indramayu.

Sebagai wujud rakyat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan juga melalui partai politik. Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Keorganisasian partai politik ini sangat penting karena melalui partai politik warga negara dapat turut serta berpartisipasi terhadap proses pengelolaan negara. Indonesia menganut sistem multi partai,

banyak partai politik di Indonesia pada awal pemilu dan muncul banyak lagi setelah revormasi. Di Indonesia calon legislatif harus merupakan perwakilan atau kader partai politik juga Presiden dan Wakil Presiden harus diusung oleh partai politik, sedangkan pilkada dapat diusung oleh partai maupun perseorangan dengan syarat yang sudah diatur (Budiardjo, 2008).

Berbicara tentang pemilu tidak lepas juga dari elektabilitas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Elektabilitas berarti keterpilihan, dalam politik kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai (Meliala & Nurdiansyah, 2019).

Membahas tentang pemilu tidak terlepas dari perilaku pemilih yang akan mendukung dan memberikan suaranya terhadap partai politik dan calon Bupati pada saat pemilu. Pemilu merupakan instrumen untuk mengekspresikan pilihan politik rakyat. Perilaku pemilih dapat dipengaruhi dari kondisi politik dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi perilaku pemilih sehingga rakyat memilih calon pemimpinnya dalam pemilu.

## **2.2. Teori Perilaku Pemilih**

Berbicara tentang perilaku pemilih tentu kita lihat terlebih dahulu asal katanya. Perilaku dalam KBBI memiliki arti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan dan pemilih memiliki arti orang yang memilih. Dalam hal ini perilaku diartikan sebagai sikap seseorang terhadap sesuatu dan pemilih diartikan sebagai orang yang memilih dalam pemilihan

umum. Perilaku dalam bahasa Inggris (*behavior*) menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionaries* diartikan sebagai "*the way that somebody behaves, especially towards other people*" cara seseorang berperilaku, terutama terhadap orang lain. Sedangkan pemilih (*voting*) memiliki diartikan sebagai "*the action of choosing somebody/something in an election or at a meeting*" tindakan memilih seseorang/sesuatu dalam pemilu atau rapat. Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 198 dijelaskan pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

Kemudian menurut Miriam Budiardjo yang mendefinisikan bahwa perilaku pemilih sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang turut serta aktif dalam kehidupan politik, dengan contoh memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mereka mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat-rapat umum, mengadakan *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, mengikuti atau menjadi anggota partai dan lain sebagainya (Budiardjo, 2008)

Sedangkan menurut Mahendra perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu. Kemudian oleh Kristiadi menjelaskan perilaku pemilih sebagai keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum

berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor rasional pemilih atau disebut teori *voting behavioral*. Berdasarkan uraian diatas perilaku pemilih diartikan sebagai tindakan seseorang memberikan suara terhadap orang dan partai dalam pemilihan umum yang dijadikanya sebagai alasan untuk dia memilihnya (Kaesmetan & Hapsari, 2019).

Berdasarkan pendapat dari kristiadi yang mengemukakan pendapatnya bahwa perilaku pemilih dilihat dari beberapa faktor pendekatan yang mempengaruhinya. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa pendekatan yang berkembang selama ini yaitu:

#### 1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis dikenal dengan pendekatan Columbia (*Columbia's University Bereau of Applied Social Science*). Hal ini karena kelompok ini melakukan penelitian voting pada tahun 1948 dan 1952. Dari karyanya mengungkapkan bahwa perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Dalam pendekatan ini, agama, pendidikan, jenis kelamin, faktor geografis, budaya serta variabel sosial adalah variabel yang dominan dalam mempengaruhi seorang pemilih dalam menentukan pilihannya (Kaesmetan & Hapsari, 2019).

Pendekatan sosiologis digambarkan peta kelompok masyarakat dan setiap kelompok dilihat sebagai basis dukungan terhadap partai tertentu. Pengelompokan ini bisa berdasarkan gender (perempuan dan laki-laki), usia

(muda dan lanjut usia). Dapat pula berdasarkan organisasi formal dan informal. Pendekatan sosiologis mengasumsikan bahwa preferensi politik, sebagaimana juga preferensi voting, adalah produk karakteristik sosio ekonomi, seperti pekerjaan, kelas, agama dan ideologi. Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih.

Faktor sosiologis yang paling memengaruhi keputusan seseorang memilih partai politik atau calon pejabat publik adalah agama. Variabel agama dalam teori perilaku pemilih merujuk pada bagaimana keyakinan, praktik, dan identitas keagamaan seseorang memengaruhi pilihan politik mereka. Agama sering kali memainkan peran penting dalam menentukan preferensi politik, karena dapat membentuk nilai-nilai, norma, dan pandangan dunia individu. Partai politik atau calon pejabat publik yang mempunyai platform keagamaan yang sama dengan karakteristik pemilih, cenderung akan didukung oleh pemilih tersebut. Seorang Muslim akan cenderung memilih partai atau calon pejabat publik yang berplatform Islam dibandingkan dengan agama lain, misal kristen (Mujani, Lidlle, & Ambardi, 2012).

Identitas keagamaan seringkali menjadi bagian integral dari identitas pribadi seseorang. Pemilih mungkin cenderung mendukung kandidat atau partai politik yang mereka anggap lebih mewakili atau menghormati identitas keagamaan mereka. Keyakinan agama dapat membentuk pandangan pemilih tentang isu-isu moral dan etika. Organisasi keagamaan dan pemimpin agama sering kali terlibat dalam mobilisasi pemilih.

Agama akan menjadi variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini karena agama yang merupakan variabel dominan menarik untuk dilihat apakah akan berpengaruh pada elektabilitas bakal calon bupati sebagai calon pejabat publik. Dalam hal ini agama yang dianut bakal calon pejabat publik apakah menjadi pertimbangan dalam memilihnya.

## 2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dikenal dengan pendekatan Michigan (*The Michigan Survey Research Center*). Pendekatan ini pertama kali dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan Survei Universitas Michigan. Pendekatan ini muncul karena ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis karena kurang menjelaskan kecenderungan masyarakat secara metodologis. Menurut mazhab ini terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pilihan seseorang yaitu keterikatan seseorang dalam partai politik, orientasi seseorang terhadap calon anggota parlemen, orientasi seseorang terhadap isu- isu politik (Kaesmetan & Hapsari, 2019).

Munculnya pendekatan psikologis merupakan reaksi atas ketidakpuasan terhadap beberapa ilmuwan politik pada pendekatan sosiologis. Beberapa ilmuwan penganut pendekatan psikologis menganggap pendekatan sosiologis secara metodologis sulit dilaksanakan, terutama dalam aspek pengukurannya. Dalam pendekatan psikologis, perilaku pemilih ditentukan oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri pemilih (*voters*) sebagai produk dari proses sosialisasi. Model psikologis tentang perilaku pemilih ini mencakup apa yang disebut dengan indentifikasi diri dari partai politik atau

identitas partai (*Party ID*), opini tentang isu-isu atau kebijakan publik yang terkait dan opini tentang kualitas kepribadian tokoh-tokoh partai atau calon-calon yang bersaing dalam pemilihan presiden (Mujani, Lidlle, & Ambardi, 2012).

Sikap seseorang di sini sebagai refleksi dari kepribadian seseorang yang merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap seseorang yang akan dinilai dalam penelitian ini merupakan sikap kepemimpinan dari seseorang pemimpin atau calon pejabat publik sebagai pertimbangan pemilih memilih pejabat publik tersebut.

Variabel kepemimpinan merujuk pada pengaruh persepsi pemilih terhadap sifat, tindakan, dan karakteristik pemimpin politik pada pilihan mereka dalam pemilu. Menurut Muhammad Busro Gaya atau sikap kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten yang diperankan oleh pemimpin ketika memengaruhi anggota kelompok (Busro, 2018).

Pemimpin yang karismatik sering kali memiliki daya tarik emosional yang kuat bagi pemilih. Pemimpin dengan kepribadian yang kuat, kemampuan berbicara yang baik, dan kemampuan untuk menginspirasi atau memotivasi orang sering kali lebih berhasil dalam menarik dukungan pemilih. Pemilih cenderung mendukung pemimpin yang mereka anggap kompeten dan mampu mengelola pemerintahan atau menangani isu-isu penting dengan baik. Persepsi tentang pengalaman, keahlian, dan rekam jejak keberhasilan pemimpin dapat sangat mempengaruhi keputusan pemilih. Pemimpin yang dianggap jujur,

transparan, dan memiliki moralitas tinggi cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dibandingkan dengan pemimpin yang dianggap korup atau tidak dapat dipercaya. Kemampuan pemimpin untuk berkomunikasi secara efektif dengan publik dan menyampaikan pesan-pesan politik secara jelas dan persuasif juga merupakan faktor penting. Pemimpin yang dianggap dekat dengan rakyat, memahami kebutuhan dan permasalahan mereka, dan menunjukkan empati cenderung lebih disukai.

### 3. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional yang diadopsi dari ilmu ekonomi, dalam pendekatan ini ada keterkaitan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik, dalam pendekatan ini ada kaitan antara “pasar” (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Anthony Downs dari Stanford University dan Brookings Institution dengan karyanya *An Economic Theory of Democracy* (1953), yang menekankan pada pentingnya faktor-faktor ekonomi atau kepentingan material dalam menentukan perilaku politik. Menurut Anthony Downs melalui deskripsinya mengenai *homo economicus*, bahwa sang pemilih rasional hanya menuruti kepentingannya sendiri atau walaupun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Ini sebut juga dengan *self-interest axiom*. Walaupun menurut Downs, tidak semua orang merupakan orang yang egois, namun ia tiba pada kesimpulan bahwa “sosok-sosok heroik” ini dari segi jumlah dapat diabaikan. Manusia bertindak egois, terutama oleh karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan material mereka, yakni pemasukan atau harga benda mereka (Syafhendry, 2016).

Dalam faktor rasionalitas pemilih mengharapkan adanya manfaat bagi dirinya. Terhadap pilihannya pemilih akan rugi jika ternyata anggota DPR atau presiden yang dipih bukan yang dia inginkan, bukan yang dinilai mewakili kepentingannya. Pemilih datang ke TPS ingin memperjuangkan kepentingannya melalui wakil-wakil atau pemimpin nasionalnya. Hal ini mengandaikan pemilih punya pengetahuan atau informasi yang cukup tentang kebijakan-kebijakan publik. Selain itu pemilih mengetahui kebijakan calon yang mereka janjikan hingga mereka dapat memilih calon yang dapat memperjuangkan kepentingannya dan yang tidak (Mujani, Lidlle, & Ambardi, 2012).

Jika hal ini diterapkan kepada perilaku pemilih, maka ini berarti bahwa pemilih yang rasional akan memilih partai, calon legislatif, calon kepala daerah yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Bisa dilihat dari visi misinya Pemilih tidak terlalu tertarik kepada konsep politik sebuah partai, melainkan kepada keuntungan terbesar yang dapat ia peroleh apabila partai ini menduduki pemerintah dibandingkan dengan partailain.

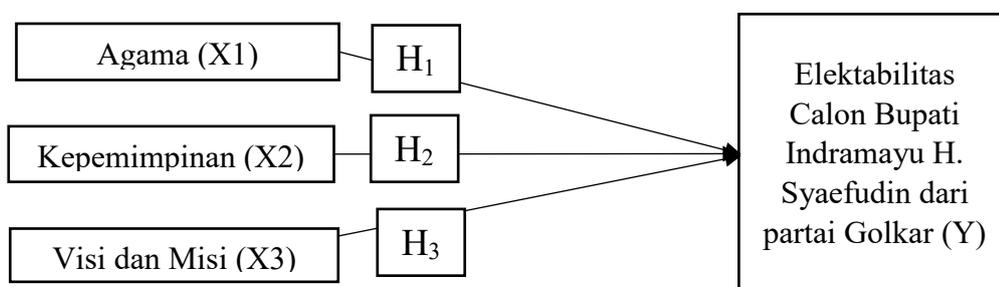
Variabel visi-misi merujuk pada pengaruh yang ditimbulkan oleh visi dan misi yang disampaikan oleh kandidat atau partai politik terhadap pilihan pemilih. Visi-misi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan jangka panjang dan rencana aksi spesifik yang akan diambil oleh kandidat atau partai jika terpilih. Pemilih cenderung mendukung kandidat atau partai yang memiliki visi dan misi yang jelas dan sejalan dengan kepentingan serta nilai-nilai mereka. Pemilih sering kali lebih tertarik pada visi-misi yang relevan dengan

masalah dan isu yang mereka anggap paling penting. Pemilih akan lebih percaya pada visi dan misi yang disampaikan oleh kandidat atau partai yang dianggap kredibel dan memiliki rekam jejak yang baik. Pemilih mungkin mempertimbangkan apakah kandidat atau partai telah berhasil mengimplementasikan visi-misi mereka di masa lalu. Rekam jejak keberhasilan atau kegagalan dapat memengaruhi kepercayaan pemilih terhadap janji-janji baru yang dibuat.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi elektabilitas bakal calon bupati Indramayu H. Syaefudin Dari Partai Golkar, dijelaskan pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian**



Berdasarkan kerangka pemikiran untuk penelitian ini, maka bisa dikemukakan dan dirumuskan anggapan dasar yaitu, penulis menggunakan pendekatan perilaku pemilih yang terdiri atas tiga pendekatan yakni pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional untuk memudahkan penulis dalam mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas bakal calon bupati Indramayu H. Syaefudin dari partai Golkar

berdasarkan faktor-faktor perilaku pemilih. Ketiga pendekatan ini diturunkan menjadi faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur pola perilaku pemilih Masyarakat Indramayu dengan indikator sebagai berikut :

1. Faktor sosiologis yang diukur dari agama.
2. Faktor psikologis yang diukur dari kepemimpinan.
3. Faktor rasional yang diukur dari visi dan misi.

Dengan dinamika yang terjadi di Partai Golkar Kabupaten Indramayu dan perpolitikan di Kabupaten Indramayu maka elektabilitas H. Syefudin akan terpengaruh oleh beberapa dinamika tersebut. Untuk itu penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh agama, kepemimpinan dan visi dan misi terhadap elektabilitas bakal calon bupati Indramayu H. Syaefudin dari partai Golkar.

#### **2.4. Hipotesis**

Berdasarkan pemahaman dan penjelasan teoritis sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka hipotesis-hipotesis yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_01$  = Faktor sosiologis berdasarkan agama tidak berpengaruh terhadap elektabilitas bakal calon bupati Indramayu H. Syaefudin dari partai Golkar.
- $H_{a1}$  = Faktor sosiologis berdasarkan agama berpengaruh terhadap elektabilitas bakal calon bupati Indramayu H. Syaefudin dari partai Golkar.

- Ho2 = faktor psikologis berdasarkan kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap elektabilitas bakal calon bupati Indramayu H. Syaefudin dari partai Golkar.
- Ha2 = faktor psikologis berdasarkan kepemimpinan berpengaruh terhadap elektabilitas bakal calon bupati Indramayu H. Syaefudin dari partai Golkar.
- Ho3 = faktor rasional pemilih berdasarkan visi dan misi tidak berpengaruh terhadap elektabilitas bakal calon bupati Indramayu H. Syaefudin dari partai Golkar.
- Ha3 = faktor rasional pemilih berdasarkan visi dan misi berpengaruh terhadap elektabilitas bakal calon bupati Indramayu H. Syaefudin dari partai Golkar.